



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

I. DATA PRIBADI

- Nama : ACHMAD IFTAUDDIN
- Jabatan : WAKIL KETUA
- NHK : 621826

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.260.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/350 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
- Tanah Seluas 1300 m2 di DEMAK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 190.000.000
- Tanah Seluas 600 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

- MOTOR, YAMAHA VEGA R/350 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.639.307

F. HARTA LAINNYA Rp. 30.000.000

Sub Total Rp. 2.469.639.307

III. HUTANG Rp. 159.779.199

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.309.860.108

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.